



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

Dilema Pembangunan Puskesmas Kayu Putih di Jakarta Timur

Rhama Purna Jati

Kebutuhan warga akan puskesmas di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, memang sangat tinggi. Namun, infrastruktur yang tersedia tidak memadai. Hingga kini, pemerintah tengah berupaya mencari tempat terbaik, termasuk dengan mengokupasi ruang terbuka hijau.

Yuliardi (54), warga Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (14/12/2023), duduk bersama cucu dan istrinya di Puskesmas Kayu Putih. Dia menunggu panggilan untuk mengambil obat yang diperlukan guna menyembuhkan batuk yang diderita sang cucu.

Di sana, ketiganya duduk di kursi seadanya dengan ditundangi tenda darurat berwarna biru. Tidak hanya dari sisi fasilitas ruang tunggu, ruang pemeriksaan dokter pun terbilang tidak cukup untuk memenuhi besarnya kebutuhan masyarakat. "Setiap hari, mungkin ada ratusan pasien datang ke puskesmas ini. Saya harus menunggu sampai dua jam," kata Yuliardi.

Walau memiliki fasilitas seadanya, menurut dia, Puskesmas Kayu Putih sudah cukup memenuhi kebutuhan warga sekitar. Jaraknya yang cukup dekat dari rumahnya, yakni hanya 2 kilometer, membuat Yuliardi lebih mudah mendapatkan akses kesehatan. Belum lagi, jika dibandingkan dengan fasilitas kesehatan yang lain, puskesmas ini terbilang cukup terjangkau, bahkan bisa gratis.

Enam bulan lalu, Yuliardi didiagnosis menderita tuberkulosis (TBC). Dengan mendatangi puskesmas secara rutin untuk berobat, satu bulan

lalu, ia dinyatakan sembuh total dari penyakit menular itu. "Mungkin kalau lokasinya jauh dari rumah, saya tidak akan sembuh secepat ini," ujarnya.

Seperti Yuliardi, Heri (32), warga Kayu Putih, ingin puskesmas lebih mudah diakses. Ia juga berharap tenaga kesehatan ditambah sehingga waktu layanan lebih cepat. Pembangunan puskesmas baru juga diharapkan segera terealisasi. "Mungkin dengan bangunan yang lebih besar akan lebih banyak ruang untuk pengobatan pasien dibandingkan bangunan yang ada sekarang ini," katanya.

Tak memadai

Pemerintah menilai pembangunan puskesmas dinilai sudah mendesak karena kapasitas yang tersedia saat ini tidak lagi memadai. Dengan luas hanya 300 meter persegi, pelayanan di Puskesmas Kayu Putih kurang optimal. Puskesmas ini sudah beroperasi di lahan itu sekitar empat tahun lalu.

Sekretaris Kelurahan Kayu Putih Parno menyebut, sejak awal berdiri, Puskesmas Kayu Putih selalu mengontrak bangunan milik orang lain. "Sebelum beroperasi di tempat yang sekarang, Puskesmas Kayu Putih juga telah mengontrak rumah untuk menjalankan pelayanan tapi ukurannya lebih sempit," kata Parno.

Oleh karena itu, pembangunan puskesmas sudah sangat mendesak. Namun, pembangunannya membutuhkan lahan, sedangkan lahan publik yang tersedia hanya di ruang terbuka hijau (RTH). "Memang ada lahan lain, tetapi itu sudah diserahkan kepada pihak ketiga," ujar Parno.

Sementara itu untuk membeli lahan baru, tak ada anggarannya. "Toh yang dialihfungsikan hanya 750 meter persegi atau hanya 20 persen dari total luas RTH, yakni 4.300 meter persegi. Menurut saya ini sudah *win-win solution*," ungkapnya.

Menurut Parno, pemerintah sudah melalui kajian yang cukup matang, mulai dari pengukuran tanah hingga sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan rancang bangun yang dibuat, puskesmas seluas 750 meter persegi itu akan diba-

ngun empat lantai. Pembiayaannya dari APBD DKI Jakarta tahun depan.

Status lahan

Terkait rencana itu, warga Tanah Mas RW 001, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, menilai tindakan pemerintah tidak didasari musyawarah bersama warga. Warga bahkan menilai pemerintah cenderung arogan.

Oleh karena itu, melalui kuasa hukumnya, Barus, warga Tanah Mas melayangkan gugatan pidana dan perdata atas alih fungsi lahan RTH di wilayahnya. Sebab, RTH yang menurut rencana akan dialihfungsikan menjadi puskesmas ini belum memiliki status kepemilikan yang jelas.

"Dari Pemerintah Kota Jakarta Timur, RTH ini milik Pemprov Jakarta, sedangkan dari Kelurahan Kayu Putih menyatakan lahan ini milik PT Pulomas Jaya," kata Barus.

Adapun dari warga belum ada akta yang jelas mengenai kepemilikan lahan RTH seluas 4.200 meter persegi itu.

"Hingga saat ini, belum ada searah terima lahan dari warga kepada pemerintah ataupun ke perusahaan," ujar Barus.

Ketua RW 001 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Mohamad Imsan berharap jangan sampai ada kesan warga menolak pembangunan puskesmas. "Kami tidak menolak pembangunan puskesmas, tetapi jangan sampai pembangunan itu mengokupasi RTH," kata Imsan.

Apalagi, sampai sekarang belum ada status yang jelas tentang kepemilikan lahan. "Pemerintah masih menunggu lahan ini diserahkan. Itu berarti lahan ini bukan milik pemerintah," katanya.

RTH yang ada di wilayahnya sudah ada sejak tahun 1970-an. Adapun pembangunan tembok RTH baru dilakukan pada 1998 ketika terjadi kerusuhan di Jakarta. "Ketika itu, di kawasan ini sering terjadi penjarahan. Inilah yang membuat wilayah perumahan di tembok," katanya.

Perlawanan itu muncul karena warga menilai pemerintah mengokupasi RTH dengan menjebol tembok milik warga pada Rabu (15/11/2023). Imsan menegaskan, alih fungsi lahan menjadi puskesmas ini mencederai upaya Pemprov DKI memperluas lahan terbuka hijau. "Saat ini saja, RTH di Jakarta masih kurang, masa RTH yang sudah ada mau dialihfungsikan lagi," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta Muhammad Aminullah mengatakan, taman itu merupakan RTH-5. Alih fungsi seharusnya dilakukan sebelum taman dibangun.

RTH di Taman Tanah Mas juga merupakan zona lindung terbuka hijau sesuai Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Desain Tata Ruang DKI Jakarta.

"Warga tak seharusnya diberi pilihan antara fasilitas kesehatan publik dan ruang publik. Dua-duanya dibutuhkan warga," katanya.

Saat ini cakupan RTH di Jakarta masih sekitar 5 persen dari 30 persen yang diwajibkan undang-undang.

Pemerintah juga tengah gencar menangani polusi udara, salah satunya dengan memperbanyak RTH. Pihaknya berharap segera ada kesepakatan bersama antara warga dan pemerintah.